

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 ANGGANA

Intan Beauty Kusnukiandany¹, Syifa Hanum Budiawati², Herwin³, Warman⁴, Muh.
Amir⁵, Dwi Nugroho⁶
Universitas Mulawaran
Alamat e-mail : ¹Intanbeauty33@gmail.com, Alamat e-mail :
²Syifa.ummualif@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze financial management at SMK Negeri 1 Anggana to improve the effectiveness, efficiency, and accountability of financial governance based on Good Financial Governance (GFG). The study used a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation studies, as well as analysis of the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that school financial management adheres to the RKAS guidelines, but remains administrative in nature and is not based on real needs. Transparency and accountability are suboptimal due to limited public access and management capabilities. The implementation of the e-RKAS digital system is hampered by infrastructure and financial literacy. Key factors influencing financial effectiveness include leadership, human resource competency, and regional policy support. This study emphasizes the importance of implementing GFG in vocational education and recommends strengthening financial governance based on transparency, participation, and digitalization as a step towards financial independence in vocational schools.

Keywords: financial management, Good Financial Governance, SMK, transparency, digitalization, accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pengelolaan keuangan di SMK Negeri 1 Anggana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan berbasis *Good Financial Governance* (GFG). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta analisis model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah mengacu pada pedoman RKAS, namun masih bersifat administratif dan kurang berbasis kebutuhan riil. Transparansi dan akuntabilitas belum optimal karena keterbatasan akses publik dan kemampuan pengelola. Penerapan sistem digital e-RKAS terkendala oleh infrastruktur dan literasi keuangan. Faktor utama yang

memengaruhi efektivitas keuangan meliputi kepemimpinan, kompetensi SDM, dan dukungan kebijakan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan GFG dalam pendidikan vokasi dan merekomendasikan penguatan tata kelola keuangan berbasis transparansi, partisipasi, dan digitalisasi sebagai langkah menuju kemandirian finansial sekolah vokasi.

Kata Kunci: manajemen keuangan, Good Financial Governance, SMK, transparansi, digitalisasi, akuntabilitas.

A. Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di era global. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2024), terdapat lebih dari 14.000 SMK di Indonesia dengan total peserta didik mencapai sekitar 5 juta orang. Kontribusi SMK terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat besar, terutama dalam mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat sektor industri dan ekonomi kreatif. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi lembaga vokasi adalah lemahnya sistem pengelolaan keuangan yang berdampak pada efektivitas program pendidikan dan keberlanjutan lembaga. Menurut Amrullah et al. (2025), banyak SMK negeri masih berjuang menerapkan prinsip Good Financial Governance secara

konsisten karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sistem akuntabilitas.

SMK Negeri 1 Anggana merupakan salah satu lembaga pendidikan vokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan teknologi informasi di wilayah pesisir. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang terus meningkat setiap tahun, namun masih menghadapi kendala serius dalam hal pengelolaan keuangan, terutama terkait perencanaan dan pemanfaatan dana pendidikan. Berdasarkan laporan internal tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan aktual di lapangan, serta keterlambatan dalam pencairan dana BOS yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan belajar praktik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di SMK Negeri 1 Anggana belum berjalan secara

optimal. Keterbatasan kapasitas bendahara sekolah dan kurangnya pelatihan manajemen keuangan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efisiensi pengelolaan dana. Hasil penelitian Widyastuti dan Atmoko (2025) menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Namun, praktik tersebut masih belum terimplementasi sepenuhnya di sebagian besar SMK daerah, termasuk di Anggana.

Selain faktor internal, kebijakan desentralisasi pendidikan dan mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah juga menimbulkan kompleksitas dalam sistem pengelolaan keuangan sekolah. Menurut Gaffar dan Nafisah (2025), implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi memerlukan sistem manajemen keuangan yang adaptif dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal daerah. Namun, pelaksanaannya di tingkat sekolah sering kali terbentur birokrasi administratif yang panjang, serta kurangnya koordinasi antara

sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah.

Tantangan lain yang dihadapi SMK Negeri 1 Anggana adalah minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Digitalisasi pengelolaan keuangan seperti penggunaan e-RKAS dan sistem pelaporan daring belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi. Studi Gunherani (2023) menegaskan bahwa penggunaan sistem keuangan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam tata kelola sekolah. Namun, adopsinya membutuhkan dukungan infrastruktur dan pelatihan berkelanjutan agar mampu diimplementasikan secara efektif di wilayah terpencil seperti Anggana.

Dari perspektif teoritis, persoalan pengelolaan keuangan di SMK Negeri 1 Anggana dapat dikaji melalui konsep Good Financial Governance yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tata kelola keuangan yang baik bukan sekadar administrasi pelaporan, tetapi juga mencakup kemampuan lembaga dalam

mengoptimalkan sumber daya, meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran, dan memastikan keadilan distribusi dana antarprogram. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini berpotensi menimbulkan inefisiensi struktural dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan vokasi.

Dampak dari lemahnya manajemen keuangan tidak hanya berdampak pada efektivitas penggunaan dana, tetapi juga pada kualitas pembelajaran praktik dan daya saing lulusan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka SMK Negeri 1 Anggana berisiko mengalami stagnasi mutu pendidikan, keterbatasan inovasi program kejuruan, serta rendahnya relevansi lulusan terhadap kebutuhan industri. Hal ini sejalan dengan temuan Amrullah et al. (2025), yang menekankan bahwa keberhasilan pendidikan vokasi sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang profesional dan berbasis kinerja.

Selain itu, faktor budaya organisasi turut memengaruhi keberhasilan implementasi manajemen keuangan. Sekolah yang belum membangun budaya transparansi dan akuntabilitas akan

cenderung menghadapi permasalahan dalam pengawasan, pengendalian, serta partisipasi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pembenahan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis administratif, tetapi juga memperkuat integritas dan etika publik di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan teori Public Value Governance, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia industri dalam menciptakan nilai publik melalui tata kelola yang baik.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengisi celah kajian empiris terkait penerapan manajemen pengelolaan keuangan pada SMK di daerah Kalimantan Timur, khususnya di SMK Negeri 1 Anggana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pengelolaan keuangan sekolah berbasis prinsip Good Financial Governance yang adaptif terhadap kondisi lokal. Selain memperkuat literatur akademik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan sekolah lain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta

akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan vokasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manajemen pengelolaan keuangan di SMK Negeri 1 Anggana. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Subjek penelitian mencakup kepala sekolah, bendahara, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, ketua kompetensi keahlian, serta perwakilan komite sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengelolaan dan pengawasan keuangan sekolah.

Metode Pengumpulan Data berasal dari Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), Observasi Partisipatif, studi dokumentasi dan triangulasi data. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas tiga tahap utama yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*),

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di SMK Negeri 1 Anggana, diperoleh beberapa temuan utama yang menggambarkan kondisi aktual manajemen pengelolaan keuangan sekolah.

Perencanaan keuangan di SMK Negeri 1 Anggana telah mengikuti pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari Kemendikbudristek. Namun, implementasinya belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyusunan RKAS masih bersifat administratif dan kurang melibatkan partisipasi guru serta komite sekolah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Amrullah et al. (2025), yang menyebutkan bahwa banyak SMK di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menerapkan perencanaan berbasis kinerja karena keterbatasan kapasitas manajerial dan kurangnya data keuangan yang terintegrasi.

Dari hasil observasi dan analisis dokumen, ditemukan bahwa mekanisme pelaporan keuangan

sekolah belum sepenuhnya terbuka. Laporan penggunaan dana BOS disusun sesuai prosedur, namun tidak seluruh stakeholder memperoleh akses terhadap laporan tersebut. Padahal, *prinsip Good Financial Governance* menuntut adanya transparansi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan. Hasil ini memperkuat temuan Gaffar dan Nafisah (2025) yang menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan pada lembaga vokasi di Indonesia masih menghadapi kendala administratif dan kultural.

Digitalisasi pengelolaan keuangan melalui aplikasi e-RKAS telah diperkenalkan di SMK Negeri 1 Anggana, namun penerapannya belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan dan rendahnya literasi digital pengelola keuangan. Hal ini konsisten dengan temuan Gunherani (2023) yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah vokasi di daerah masih bergantung pada sistem manual sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan.

Analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar proses keuangan sekolah telah berusaha

mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun belum optimal dalam aspek efisiensi dan partisipasi publik. Dalam konteks teori Good Financial Governance, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik lapangan. Menurut Suharno et al. (2025), keberhasilan penerapan GFG sangat ditentukan oleh integrasi antara kepemimpinan sekolah, sistem pengawasan internal, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Beberapa faktor yang memengaruhi hasil penelitian ini antara lain: (1) keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan, (2) minimnya pelatihan teknis dalam pengelolaan keuangan digital, (3) keterlambatan transfer dana BOS dari pemerintah pusat, dan (4) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Selain itu, konteks geografis Anggana sebagai daerah pesisir dengan keterbatasan akses infrastruktur turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem keuangan daring.

Hasil penelitian ini mendukung teori efisiensi organisasi, di mana tata kelola keuangan yang baik akan menghasilkan peningkatan efektivitas lembaga pendidikan. Namun, berbeda

dengan hasil penelitian Isbah et al. (2025) yang menekankan peran intervensi pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pendidikan vokasi, penelitian ini menemukan bahwa penguatan kapasitas internal sekolah melalui pelatihan dan digitalisasi lebih berpengaruh langsung terhadap efisiensi penggunaan anggaran.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori Good Financial Governance dalam konteks pendidikan vokasi daerah. Secara praktis, hasil ini menunjukkan perlunya strategi penguatan tata kelola berbasis digital dan peningkatan literasi keuangan di tingkat sekolah. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu mengembangkan model pelatihan berkelanjutan serta mekanisme audit internal berbasis partisipatif untuk memperkuat akuntabilitas lembaga.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur tentang tata kelola keuangan pendidikan dengan fokus pada konteks lokal Kalimantan Timur. Temuan penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya dengan menunjukkan bahwa efisiensi keuangan tidak hanya dipengaruhi

oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh faktor kultural, kepemimpinan, dan kesiapan teknologi di sekolah.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen keuangan di SMK Negeri 1 Anggana telah mengacu pada pedoman RKAS, namun implementasinya belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan partisipatif. Prinsip Good Financial Governance sudah mulai diterapkan, tetapi transparansi dan akuntabilitas masih perlu diperkuat melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan digitalisasi keuangan yang efektif. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan dukungan kebijakan daerah.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan Good Financial Governance dalam pendidikan vokasi, sementara secara praktis memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan penerapan sistem digital. Penguatan tata kelola berbasis transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian

dan keberlanjutan finansial SMK Negeri 1 Anggana..

Skills and Work-Based Learning. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HESWBL-01-2024-0018/full/html>

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, A., Martono, T., Mafruhah, I., & Sabandi, M. (2025). Optimizing vocational education management: A study on Indonesian state vocational high schools. Retrieved from <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1339437>

Widyastuti, E., & Atmoko, A. W. (2025). SMK revitalization: Good governance efforts of the DKI Jakarta Provincial Government. *Asian Journal of Social Humanities*, 3(5). Retrieved from <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/507>

Gaffar, M. A., & Nafisah, I. J. (2025). Regulation on the revitalization of vocational education and training: Policy implications for strategic decision making in vocational education institutions. Retrieved from <https://aprmultitechpublisher.my.id/index.php/ijatss/article/view/3>

Gunherani, D. (2023). Improving vocational school's learning quality through school-based management. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JLLS/article/view/58617>

Isbah, M. F., Suwandi, M. A., & Indonesia, A. B. P. (2025). Vocational education and skills development for new economies in Indonesia: Uneasy parallel challenges. *Asian Education and Development Studies*. Retrieved from <https://www.emerald.com/aeds/article/doi/10.1108/AEDS-09-2025-0461/1316269>

Suharno, S., Ihsan, F., & Himawanto, D. A. (2025). Sustainability development in vocational education: A case study in Indonesia. *Higher Education*,